

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Desa Sampali Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di pemerintah Desa yang mengatur dan membina masyarakat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus permasalahan di desa sampali adalah bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa di Desa Sampali Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pengertian ini dapat dilihat seorang kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur pemerintahannya dibalik kebebasan tersebut terkandung resiko yang besar pula, dimana kepala desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam berbagai bidang kehidupan manusia khususnya organisasi maupun instansi. Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Manusia merupakan faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu organisasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Organisasi harus mendayagunakan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien dengan cenderung kearah peningkatan kinerja pegawai. Agar aktivitas instansi berjalan dengan baik, pemimpin harus membina pegawai sehingga memiliki potensi, serta usaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan instansi seoptimal mungkin sehingga kinerja pegawai meningkat.

Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud dengan penuh pengertian dan kesadaran bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin tersebut. Kemampuan yang dimiliki pemimpin yang baik untuk membina atau mengarahkan bawahannya dalam suatu organisasi atau instansi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Melalui komunikasi dengan baik langsung atau tidak langsung seorang pemimpin harus mempunyai integritas, bertanggung jawab, mempunyai pengetahuan yang luas, percaya diri dan mempunyai kepribadian yang baik atau jiwa sosial yang baik serta kemampuan meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi.

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan

kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai hubungan erat dengan motivasi, karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada kewibawaan dan juga pemimpin itu di dalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap orang dipimpin.

Menurut Pandangan Syamsul Arifin (2017:27), Kepemimpinan adalah kemampuan orang-orang untuk mencapai tujuan yang tegas dan sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan akseptansi/pemerintahan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus (informal). Kepemimpinan merupakan sebuah bidang organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain atau seluruh anggota dalam sebuah instansi atau organisasi. Dimana kepemimpinan kepala desa adalah sebagai perencanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan ditemukan bahwa selama ini kepala desa kurang berperan dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut Zulkarnaen Nasution,(2017:85) Mengatakan di Era otonomi daerah Pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi segi kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya akan berhasil apabila solidaritas sosial tetap terpelihara dan melibatkan partisipasi masyarakat secara *bottom up* (dari bawah ke atas). Bagaimana mendorong kekuatan masyarakat dari bawah (*grass root democracy*) menjadi kekuatan pembaharuan (*autonomous energy*) menuju keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan. Dimulai dari mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat

itu sendiri yaitu kewenangan yang telah ada berdasarkan asal usul nilai budayanya, dan kewenangan yang berasal dari nilai lokal positif yang berlaku, selama ini tidak diterapkan di dalam daerah.

Masyarakat desa dikenal dengan sifat gotong royong, Gotong Royong merupakan suatu bentuk saling tolong menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong merupakan perilaku yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat kita sebagai petani (agraris). Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dengan menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Bentuk kerjasama gotong royong semacam ini merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial.

Menyadari arti pentingnya pembangunan yakni mewujudkan cita-cita bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka pembangunan ini haruslah dilakukan secara sadar dan berencana oleh pemerintah bersama masyarakat agar dapat mencapai tujuan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinami, maka pada pola ketahanan nasional dimasa depan desa sangat perlu dikembangkan secara maksimal.

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan nasional yang bersifat partisipasi secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk Indonesia lebih besar bertempat tinggal di pedesaan yang hidup dari mata pencaharian pertanian, mempunyai kekerabatan yang kuat berpegang teguh kepada hukum adat dan mempunyai semangat gotong royong yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka masalah pertumbuhan penduduk mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat hidup. Maka muncul rencana pembangunan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan, maka desa harus dibangun baik secara fisik maupun mental spiritual.

Seorang kepala desa selain memimpin masyarakat kepala desa dapat diharapkan mampu memberikan motivasi terhadap masyarakat. Menurut Winardi (2017:13) mengatakan motivasi berasal dari kata (*motivation*) yang berarti menggerakkan, motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan prestasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Motivasi merupakan faktor penting lainnya selain gaya kepemimpinan yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.

peran kepala desa sangat penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberikan suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa, dan

untuk desa. Dalam tugas tersebut Kepala Desa menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Kepala Desa mempunyai peran pasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Motivasi menjadi daya dorong yang memunculkan keinginan individu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena motivasi penting sekali dalam meningkatkan kinerja atau partisipasi keberhasilan kepemimpinan kepala desa dapat dilihat dan seberapa jauh kepala desa mampu merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan melalui komunikasi serta mempengaruhi masyarakat untuk serta berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan Desa.

Keberhasilan pembangunan di tingkat desa bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata akan tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan akan lebih terarah, apabila adanya motivasi dari kepala desa, tingkat pendidikan masyarakat mendukung, kesejahteraan masyarakat terpenuhi serta sosial budaya mendukung. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa, maka kegiatan pembangunan akan berjalan sesuai yang diharapkan atau yang direncanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama

antara masyarakat dengan pemerintah. Kepala desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Peran masyarakat dan partisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana kepala desa sebagai orang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman. Konsekuensi dari kenyataan tersebut kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat di berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi selanjutnya

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Bahkan pemerintah desa diberikan wewenang sangat besar, itu tercermin dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa. Dimana pemerintah desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah melalui kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (26), kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang berada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang di laksanakan. Pembangunan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi oleh seluruh warga masyarakat. Dan optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan.

Desa sampali merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini

berbatasan langsung dengan kota medan yakni Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Penduduk desa terdapat beberapa suku yang bertempat tinggal di sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, adapun permasalahan yang pertama yaitu terdapat pada kepala Desa Sampali dimana kepala Desa Sampali kurang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desanya seperti gotong royong dalam hal pembangunan drainase. Kemudian yang kedua permasalahan pada masyarakat yaitu masyarakat di Desa Sampali tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat hanya menyerahkan tanggung jawab kepada kepala desa sehingga kepala desa sampali kesulitan untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat di desa sampali juga memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam organisasi pemerintahan desa. Masyarakat di desa sampali saat dilaksanakan rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat tidak mau menyampaikan aspirasinya.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir di perguruan tinggi dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka Rumusan masalah yang menjadi perhatian Saya sebagai penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Mengetahui Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah:

1) Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kepala desa khususnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk saling bekerja sama kepada masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Sampali.

2) Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah dipelajari pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan menambah pengetahuan penulis dalam menganalisis sebuah permasalahan.

3) Bagi akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

4) Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan desa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Menurut Listyaningsi (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Listyaningsi 2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu dan bangsa menuju modernitas, pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut H.A. Tabrani Rusyan (2018:50) Mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Menurut Rahayu (2017:178) “desa adalah berasal dari bahasa sansekerta desi yang berarti tanah kelahiran. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan”. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan.

Menurut Koentjaningrat (dalam Santoso, 2017:93) “desa adalah komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Dalam hal ini beliau tidak memberikan penegasan spesifik, bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian”.

Secara administratif indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 014 tentang desa, khususnya pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inonesia .

Menurut Bintoro (Rahayu 2017:179) ” desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain”.

Menurut simangunsong (2014:182), menyatakan bahwa :

Desa adalah desa yang sesungguhnya yang harus dikembalikan lagi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan cara menghidupkan kembali jabatan- jabatan fungsional perangkat desa dalam membantu kepala desa, dimana jabatan fungsional tersebut sebenarnya sudah sejak dulu dan sangat eksis dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

2.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Lewis (dalam Sjafrizal 2015:5) perencanaan pembangunan yaitu sekumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang bersedia secara lebih produktif. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sjahrijal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipner karena cakupannya yang meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintah dan fisik. Karena itu menyusun perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencanaan yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti planologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, pemerintah dan sosial budaya.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa bergerak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana pembangunan desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. penggunaan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten kota
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pembangunan teknologi tepat guna
- d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, maka dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan

pemberdayaan serta pernyataan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Tim pelaksana pembangunan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang terdiri atas perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam kegiatan pembangunan desa.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaanya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

2.1.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah desa menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari benar atau salah.

Siradja (2015:17) menegaskan beberapa pendapat penulis asing tentang defenisi pengawasan:

Terry (Siradja,2015:17) mendefenisikan:

Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Fayol (Siradja, 2015:18) mendefenisikan sebagai berikut :

Pengawasan terdiri dari pengajuan apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan, iya bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota dan dikordinasikan oleh inspektur kabupaten/kota. Pejabat pada pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa berkordinasi dengan camat. Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.2 Partisipasi masyarakat

Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang diartikan masyarakat dengan yang dipersepsikan pemerintah. Di Indonesia kata ini begitu sering digunakan siapa pun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa kabur. Para aparat

pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas bukan dari rakyat sendiri. Zulkarnain Nasution mengatakan Defenisi tersebut diartikan dngan istila mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut perspektif masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreativitas dan inisiatif dari rakyat mdal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan bukan melalui pendukung pembangunan.

Sutrisno Loekman mengatakan ada dua pengertian partisipasi yakni: *pertama*, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencanaan; *kedua*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut Uphoff dkk, (2017:26) mengemukakan pengertian partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hidup mereka. Partisipasi dalam pembangunan desa merupakan satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan di pedesaan, namun adanya hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif karena pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (dalam hal ini pemerintah) belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi.

Defenisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh pemerintah. Proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilakan sebagai proyek pembangunan pedesaan yang diutuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan masyarakat dianggap sebagai keinginan, karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Defenisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi.

Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar-benar konsep untuk melahirkan partisipasi masyarakat dari bawah. Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat suatu partisipasi perlu dilakukan. Pendekatan pembangunan partisipasi harus dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan penilaian, disamping bantuan pembangunan.

Menurut Uphoff (2017:27) ada tiga dimensi partisipasi antara lain : (1) jenis partisipasi apa yang dipertimbangkan, (2) siapa yang berpartisipasi didalamnya dan (3) bagaimana partisipasi terjadi. Untuk jenis partisipasi ada empat yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam memanfaatkan hasil, (4) partisipasi dalam

penilaian. Keempatnya telah mencakup rangkai berbagai aktivitas pengembangan pedesaan yang terintegrasi secara potensial.

Partisipasi dalam pembangunan akan berguna untuk mengetahui : (a) apakah inisiatif untuk berpartisipasi sebahagian besar dari pemerintah atau masyarakat lokal, atau (b) apakah relevan untuk menganalisa dan membandingkan dari waktu ke waktu (c) struktur dan (d) jalur-jalur partisipasi, misalnya apakah partisipasi terjadi berdasarkan individu atau kolekti, dengan organisasi formal atau informal, atau apakah partisipasi terjadi secara langsung atau melibatkan representasi tidak langsung dan selanjutnya pertimbangan yang harus dilakukan antara lain (e) durasi dan (f) ruang lingkup partisipasi, apakah berlangsung sekali atau untuk selamanya (*once and for all*) dan (g) pemberdayaan, yakni seberapa efektif keterlibatan seorang dalam pengambilan keputusan membawanya menuju ke arah hasil-hasil yang diinginkan.

Pendekatan partisipasi pengembangan pedesaan memerlukan suatu kombinasi antara (1) desentralisasi administrative, yang membawa berbagai institusi dan aparat pemerintah lebih dekat kearah sektor pedesaan dan mengorientasikannya kembali kepada kebutuha masyarakat (2) pembangunan atau kerja melalui organisasi atau lembaga lokal yang ada dimana organisasi ini dapat berperan atas nama masyarakat desa (3) menempatkan para pemimpin lokal dalam suatu posisi sentral guna menjembatani antar masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini para pemimpin lokal tersebut benar-benar mewakili kepentingan semua masyarakat.

Dari pendekatan partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa sistem institusi dan sistem peran semacam ini dalam sektor pedesaan menciptakan keterkaitan yang lebih seimbang dan saling bergantung antara pemerintah dan masyarakat desa, dalam sistem ini tidak berdasarkan *structural top down* yang sama dengan pendekatan sebelumnya.

Kemudian menurut Uphoff ada empat prinsip umum partisipasi pengembangan pedesaan antara lain:

1. Partisipasi tidak boleh dipandang sebagai sebuah program atau sektor yang terpisah bagi pengembangan pedesaan, namun malah sebagai sebuah pendekatan yang mungkin harus disatukan dalam semua aktivitas.
2. Partisipasi pengembangan pedesaan harus menekankan pada organisasi lokal, yang lebih dapat mendengarkan masukan dari masyarakat desa serta memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat desa yang lebih banyak dalam berbagai program pengembangan pedesaan.
3. Pembagian aset harus diperhatikan dalam dalam membangkitkan partisipasi, karena semakin tidak merata pembagian maka akan semakin sulit untuk membangkitkan partisipasi secara luas baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam keuntungan.
4. Penekanan yang harus dilakukan untuk membangkitkan partisipasi pengembangan pedesaan bukan pada otonomi lokal saja, tetapi hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal dengan syarat-syarat yang disetujui oleh semua pihak saling menguntungkan.

Dari keempat prinsip tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat desa jangan dipandang sebagai sebuah program yang terpisah dari pengembangan pedesaan, menekankan pada organisasi lokal, pembagian aset harus merata dan hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal harus disetujui semua pihak dan saling menguntungkan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desaan pelaksanaan pembangunan ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

2.2.1 Bentuk partisipasi

Partipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Irene 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal, disebut partisipasi vertikal karena terjadi bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Partisipasi secara fisik, dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga

membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan lainnya.

2. Partisipasi secara non fisik, merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahnya kepada masyarakat yang bersekolah.

Menurut Huraerah (2011:116) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, dalam bentuk sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Dalam suatu kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat menghambat keberhasilan suatu program.

Menurut Angel (2011:184) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral dan nilai masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungan nya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.3 Kepemimpinan

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013:12) kepemimpinan adalah kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses. Kemudian menurut Husaini Usman, M.Pd (2020:8) mengemukakan kepemimpinan merupakan objek dan subjek yang menarik dan tidak membosankan untuk dipeleajari, diteliti, ditulis, didiskusikan, diseminarkan, dan direfleksikan oleh semua orang, hal itu karena aspek dinamis yang terkandung didalamnya.

Menurut Priansa dan Somad (2014:185) Pemimpin berasal dari kata “leader” dan kepemimpinan berasal dari kata “leadership”. Kemudian menurut Baharuddin dan Umiarso (2014:48) Mengatakan Kepemimpinan adalah suatu kegiatan memengaruhi orang lain agar orang tersebut bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin organisasi dapat mempengaruhi perilaku dengan cara menciptakan sistem dan proses organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, kebutuhan kelompok dan kebutuhan organisasi.

Menurut Feldmon (dalam Rusdiana, 2015:44) Pengertian kepemimpinan yang mengutip dari para ahli yaitu :

- 1) Rusdiana, kepemimpinan adalah usaha sadar yang dilakukan pemimpin untuk memengaruhi anggotanya melaksanakan tugas sesuai dengan harapannya.
- 2) Newel mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai pengembangan atau tujuan organisasi.
- 3) Stogdil mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan membimbing bawahannya agar bekerja sesuai tujuan yang diharapkan.

2.3.1 Fungsi kepemimpinan

Menurut (zainal, Haddad, & Ramly, 2017:34) secara operasional dikelompokkan ke dalam lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

1. Fungsi intruksi

Komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunitator merupakan penentu kebijakan agar keputusan dilakukan secara efektif dan mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti perintah.

2. Fungsi konsultasi

Komunikasi dua arah, dimana penetapan keputusan pemimpin perlu mempertimbangkan kepada kepegawaiannya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) sehingga keputusan yang diambil akan lebih mudah mendapatkan dukungan.

3. Fungsi partisipasi

Pemimpin harus berusaha mengaktifkan keikutsertaan pegawainya baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bertindak bebas tetapi lebih terarah dalam kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain

4. Fungsi delegasi

Memberikan limpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik dalam konteks persetujuan ataupun tidak dari pimpinan. Sedangkan orang yang di percaya menerima delegasi diyakini merupakan tangan pimpinan.

5. Fungsi pengendalian

Kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah untuk tercapainya tujuan bersama.

Terdapat fungsi kepemimpinan menurut Ansory & Indrasari (2018:18),

antara lain:

- a. Pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusan itu
- b. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan

- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen
- d. Memeotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat
- e. Mengembangkan loyalitas, imajinasi dan kreativitas bawahan
- f. Memprakarsai, penggiat dan pengendalian rencana
- g. Mengkordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bawahan

2.3.2 Gaya Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) berarti membimbing atau tuntun. Kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa ada empat gaya kepemimpinan yaitu:

1. *Telling*, Pemimpin mendefinisikan peran yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan memberitahu kepada bawahan apa, dimana, dan kapan melakukan tugas.
2. *Selling*, Pemimpin menyediakan kepada bawahan dengan intruksi yang terstruktur dan juga supportif.
3. *Partisipate*, pemimpin dan bawahan berbagi dalam keputusan tentang cara terbaik menyelesaikan pekerjaan berkualitas tinggi.
4. *Delegating*, Pemimpin memberikan arah sedikit spesifik, atau dukungan personal pada bawahan.

Gaya kepemimpinan yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan dengan segenap keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa

berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu.

2.4 Kepala Desa

Menurut Peraturan pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 “kepala desa adalah pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Jadi kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintah desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Menurut Ani Sri Rahayu, (2018:185) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa bertugas penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan di samping menjalankan kegiatan-kegiatan koordinasi, fungsi, peran, dan tanggung jawab.

Mengenai peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dan pelopor pembangunan. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan penumbuhan serta mengembangkan swadaya gotong royong

masyarakat untuk merelisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab di dalam bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, juga kepala desa bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan kepada saya sebagai penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Adapun Penelitian saya yaitu berfokus kepada Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa, tepatnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Septiana Nurutami	Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Membangun Fisik Desa di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri,Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.	Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh septiani adalah Kepala Desa Ngancar sangat berperan besar dalam menggerakkan masyarakat dalam rangka pembangunan fisik desa dan perana itu sangat baik dijalankan oleh kepala desa. Motivasi yang diberikan kepala

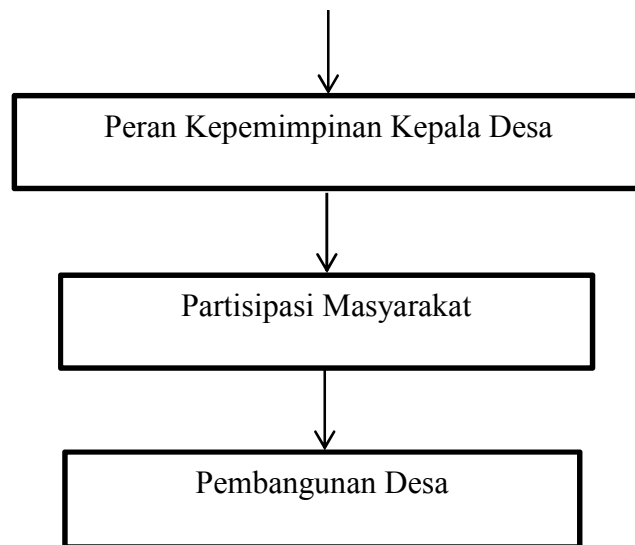
			<p>desa Ngancar kepada masyarakat ada dua bentuk yaitu motivasi swadaya berupa nasehat secara umum, dan motivasi swadaya berupa nasehat keagamaan. Maka di dalam menjalankan peran memotvasi kepala desa melakukan komunikasi yang lebih banyak lagi kepada aparat pemerintah terutama kepada BPD (badan permusyawaratan desa) yang ada di setiap dusun di desa Ngancar.</p>
2	Josep Oki	<p>Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Josep yaitu Kepemimpinan Secara Parsial memberikan pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, kepala desa di desa Sampali sudah memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat tepatnya di Desa Helvetia, akan tetapi banyak para masyarakat menghiraukan ajakan dan arahan dari pemerintah desa Helvetia sehingga hal tersebut membuat kepala desa dan aparat desa sulit mengembangkan partisipasi masyarakat terutama dalam membangun desa. serta Kepemimpinan secara simultan memberikan pengaruh yang besar terhadap para masyarakat dan</p>

			Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap masyarakat adalah sebesar 62% maka otomatis pemimpin adalah acuan utama di dalam sebuah desa.
3	Emylio	Peran kepala desa dalam meningkatkan partipasi masyarakat desa panggak di kecamatan lingga di kabupaten lingga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015	Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh emylio adalah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Kepala desa di desa panggak masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian kepala desa kurang maksimal dala mengambil suatu keputusan dikarenakan kurangnya ketegasan dari kepala desa dan penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya direncanakan.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Peneliti

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang



Penelitian ini berangkat dari peraturan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya. Hubungan sebagai penguasa pemerintah desa, mengkoordinasi pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Kepala desa berperan sebagai organisator pemerintah di desanya. Kepala desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintah desa secara keseluruhan dimana kepala desa ikut

berperan di dalamnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Metode Penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Moh Nazir (2017:37) mengatakan Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu laporan dan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan apa yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021- 30 Juni 2021.

3.3 Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti di tempat penelitian diantaranya :

1. Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi-informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sampali
2. Informan utama, merupakan yang terlibat langsung dalam peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Aparat Desa Sampali.
3. Informan Tambahan, merupakan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Adapun informan Tambahan dalam penelitian adalah Masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis di dalam melakukan sebuah penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Menurut John W. Cresweel mengatakan pengumpulan data meliputi usaha membatasi Penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk mencatat informasi.

Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara wawancara/observasi kepada informan penelitian (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku, dari internet, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder). Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk dapat digunakan.

Menurut Cresweel (2017:) langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi Kualitatif, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti mencatat, dengan mengajukan beberapa beberapa pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti, aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Peneliti kualitatif dapat juga terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipasi hingga partisipasi yang utuh.
- b. Wawancara Kualitatif, penelitian dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipasi, mewawancarai mereka, atau terlibat dalam fokus group (*interview* dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan beberapa pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka (*open ended*) yan dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipasasi masyarakat.
- c. Dokumen-dokumen Kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, *e-mail*).
- d. Materi Audio dan Visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, vidio atau segala jenis suara/bunyi.

3.5 Teknik Analisi Data

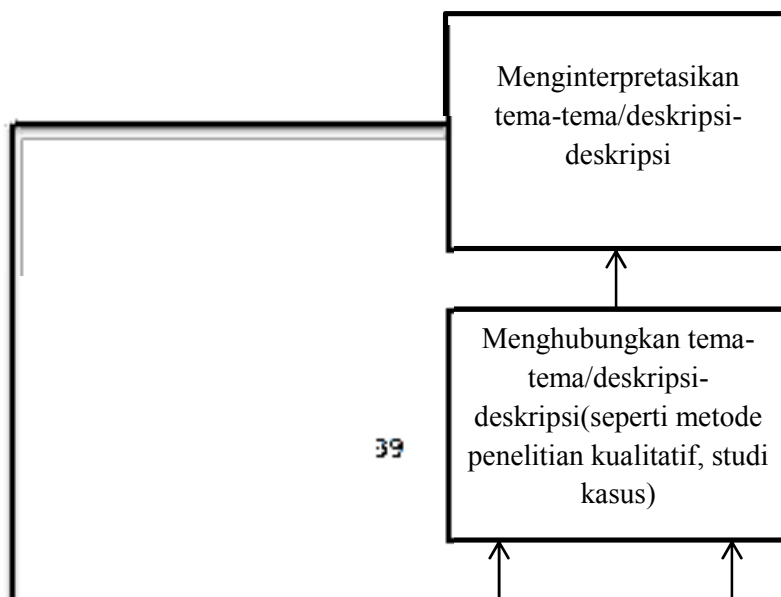
“Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat

sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informan dari para partisipasi, analisis bukti (data) terdiri atas dasar pengujian, pengkategorian, pentabulasian atau pun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generalsense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses pengolahan materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan berapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengambilan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).
4. Menetapkan proses *Coding* untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

- Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. mengajukan pertanyaan seperti “Pelajari apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Memvalidasi
keakuratan
informasi

